

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHAP I
TAHUN 2016

Rapat Koordinasi Nasional (Rakonas) Tahap I yang dilaksanakan di Palembang pada 16 – 19 Februari 2016 dengan tema “**Akselerasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam Mendukung Program Indonesia Sehat**” bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergisme antara pusat dan daerah dalam rangka peningkatan Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2016 guna mendukung Program Indonesia Sehat.

Berdasarkan arahan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, paparan para narasumber dan pejabat Eselon II, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Pengadaan obat dan alkes berdasarkan *e-catalogue* perlu diintensifkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat dan alat kesehatan. Sistem e-Monev katalog dikembangkan agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan obat berdasarkan *e-catalogue* baik secara elektronik (e-Purchasing) maupun manual.
2. Untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan vaksin sampai ke tingkat puskesmas, diperlukan penguatan manajemen pengelolaan obat dan vaksin (*one gate policy*) di setiap tingkat pemerintahan dan fasilitas kesehatan, terutama dengan mengoptimalkan pemanfaatan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016.
3. Untuk mewujudkan pemanfaatan bahan baku obat, obat tradisional, pangan, kosmetik dan produk alat kesehatan produksi dalam negeri diperlukan pembinaan produksi dan distribusi yang dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangan.
4. Upaya mewujudkan jaminan keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) membutuhkan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang dan komprehensif (*pre* dan *post market*). Pengawasan harus dilakukan selaras dengan pembinaan industri alat kesehatan dan PKRT, sehingga mendorong kemandirian nasional di bidang alat kesehatan yang dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai fungsinya.
5. Pemerintah Pusat dan Daerah berkomitmen untuk mendorong industri sediaan farmasi dan pangan untuk memenuhi standar dan persyaratan sehingga mampu berdaya saing.

6. Pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong penggunaan sediaan farmasi dan pangan yang aman, bermutu dan berkhasiat serta alkes yang rasional, guna tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal dan keselamatan pasien. Edukasi masyarakat diperlukan agar masyarakat menjadi proaktif dalam implementasi pelayanan kefarmasian dan menumbuhkan kecintaan produk dalam negeri.
7. Optimalisasi seluruh sumber pendanaan program kesehatan (dekonsentrasi, BOK, DAK, APBD) dalam memperkuat dukungan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk Program Indonesia Sehat. Hal ini perlu dimanfaatkan secara maksimal, dipantau, dan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk meningkatkan akuntabilitasnya bagi pencapaian tujuan program.
8. Perubahan kebijakan DAK dilakukan dalam rangka mendukung implementasi Nawacita utamanya untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dalam kerangka NKRI, diantaranya membangun 10 Rumah Sakit Pratama. Penentuan alokasi DAK saat ini ditentukan berdasarkan usulan dari Daerah (*Proposal Based*) agar lebih efektif, efisien dan mampu laksana

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut kesimpulan tersebut, peserta Rapat Koordinasi Nasional sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong Industri Farmasi, distributor dan satuan kerja/satker agar memanfaatkan e-monev katalog obat secara aktif sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pengadaan obat berdasarkan e-catalogue.
2. Meningkatkan kapasitas institusi dalam manajemen pengelolaan obat dan vaksin, terutama perencanaan kebutuhan, pemanfaatan e-catalogue dan e-monev catalogue serta penerapan sistem e-logistic, oleh Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Mendorong segera disiapkan payung hukum pelaksanaan one gate policy pengelolaan obat di Instalasi Farmasi.
3. Melaksanakan pembinaan sarana produksi distribusi kefarmasian dan alat kesehatan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, termasuk sosialisasi dan pemanfaatan sistem perizinan dan pelaporan secara online, serta mendorong penggunaan alat kesehatan dan bahan baku obat produksi dalam negeri.
4. Menyelenggarakan tahapan perizinan sarana produksi distribusi kefarmasian dan alat kesehatan PKRT, berdasarkan janji layanan dan prosedur operasional standar yang telah ditetapkan, baik oleh pusat maupun daerah. Dinkes akan lebih proaktif

melakukan analisis perizinan sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.

5. Memperkuat edukasi masyarakat melalui pendekatan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat), pendekatan keluarga untuk Program Indonesia Sehat dan implementasi Permenkes No 98 tahun 2015 tentang Pemberian Informasi HET obat.
6. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan, Pusat dan daerah akan melakukan sosialisasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas pelayanan Kefarmasian, peningkatan kapasitas SDM Kefarmasian, serta advokasi dalam penyediaan formasi Tenaga Kefarmasian.
7. Daerah Kab/Kota penerima DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian akan melakukan penajaman kegiatan serta akselerasi penyerapan anggaran yang sudah diterima di kas daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur Instalasi Farmasi dengan sebaik-baiknya.
8. Pelaksana Program di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota akan terus meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian. Setiap pelaksana tersebut akan mengupayakan pengawasan yang lebih terstruktur, terkoordinir, dan bersumber data terkini di lapangan.
9. Mengusulkan agar Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Wilayah Barat Tahun 2017 dilaksanakan di **Medan (Sumatera Utara)**

Demikian hasil Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Tahap I di Palembang. Kami mohon Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berkenan mempertimbangkan kesimpulan dan rencana tindak lanjut ini untuk menjadi bagian dari Hasil Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016.

Palembang, 18 Februari 2016

Atas Nama Peserta Rakonas 2016 Tahap I,
Kepala Bidang Jaminan Sarana Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Dra. Hj. Marlina, Apt., M.Si